

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Adami Chasawi, 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung
- Adji Indriyanto Seno, 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2007. *Korupsi dan Beban Pembuktian*, Alumni, Bandung
- Alatas, Syed Hususein, 1986. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.
- Alfitra, 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 2005. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum dan HAM, Jakarta
- \_\_\_\_\_ 2006. *Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia, Paper*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_ 2006. *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi di Indonesia Melawan Kejahatan korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bakri Syaiful, 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta
- Bassar M. Sudradjat, 1983. *Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung
- Chazawi Adami, 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang
- Dachmer Munthe, dalam buku Ratih Anbarini, 1990. *Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung
- Dahlan Iksan, 2005. *Memerangi Korupsi Suatu Peta Jalan Untuk Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Edi Yunara, 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gultom Binsar, 2006. *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan

- Hamzah Andi, 2001. *Ide Yang Melatarbelakani Beban Pembuktian*. Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik Tentang Beban Pembuktian, Universitas Trisaksti, Jakarta
- \_\_\_\_\_ 2005. *Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_ 2005 *Memberantas Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan International*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Harahap Yahya M, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed.2, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_ 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harianti Evi, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hehamahua Abdullah, 2005. *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hermein Hadiati Koeswadji, 1983. *Delik Harta Kekayaan Asasa-Asasa, kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya
- Kansil, CST, 1993. *Pengantar ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Kartayasa Mansyur, 2000. *Beban Pembuktian Dalam KUHAP*, Press, Jakarta
- Marpaung Laden, 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama, Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno, 1985. *Mengenal hukum suatu pengantar*, Liberty, Jogjakarta
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Undip, 24 Peburari 1990.
- Mulan Mc dalam buku Sale K Wantijk, 1983. *Tindak Pidana Korupsii*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mulyadi Lilik, 2007. *Asas Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung

\_\_\_\_\_ 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Edisi Pertama, Alumni, Bandung

Nuki, 2008. *Asas Pembuktian Terbalik*, Press, Jakarta

Philipus Hadjon, 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

## **II. Perundang-undangan.**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

\_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

\_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

\_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

\_\_\_\_\_ Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM, *Rancangan Undang-undang KUHP*, Jakarta, Departemen Hukum dan HAM, 2005.